

Analisis Terhadap Faktor Ekonomi dan Sosial Pengaruhnya Terhadap Keinginan Seseorang Untuk Melakukan Korupsi

Muhammad Nuh Fadillah

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Tulisan ini membahas pengaruh faktor-faktor ekonomi dan sosial terhadap keinginan seseorang untuk melakukan korupsi. Faktor-faktor ekonomi dan sosial merupakan motivasi dan kesempatan tindak korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian logit. Logit digunakan untuk mencari probabilitas keinginan korupsi seseorang yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial. Hasilnya faktor ekonomi mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan korupsi adalah pendapatan. Faktor sosial yang mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan korupsi adalah monopoli, akuntabilitas dan sistem kontrol kerja. Pendapatan memiliki titik minimum dalam mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan korupsi.

Kata kunci: *motivasi, kesempatan, dan keinginan korupsi.*

1. Pendahuluan

Latar Belakang

Korupsi merupakan fenomena klasik yang telah lama ada dan diyakini kebanyakan pakar usianya setua dengan peradaban masyarakat.

Ham (1983) menyebutkan korupsi telah ada ketika manusia mulai mengenal hidup berkelompok. Fatah (1998) menegaskan di masa Raja Hammurabi dari Babiloma naik tahta pada tahun 1200 SM, telah ditemukan adanya tindakan-tindakan korupsi.

Vasquez dkk (2004) menyatakan korupsi merupakan fenomena, yang umum di setiap negara di dunia. Korupsi ini tidak dapat dihilangkan namun hanya dapat dibatasi. Di beberapa negara, korupsi telah mendominasi area fiskal. Walaupun tidak disengaja namun kadang kebijakan fiskal setiap negara memudahkan praktek korupsi. Dari kebanyakan organisasi yang menaruh perhatian pada korupsi membuat data korupsi yang sebelumnya mustahil

menjadi mudah didapatkan. Keberadaan data korupsi membantu untuk pembuktian ketidakpercayaan lama dan membuat korupsi masuk dalam topik dialog yang objektif.

Atmasasmita (2001) menyebutkan perkembangan korupsi telah menjadi wabah penyakit yang menyerang setiap negara, di dunia. Korupsi kini menjadi ancaman serius yang membahayakan perkembangan kehidupan bangsa-bangsa di dunia dan seharusnya tindakan korupsi digolongkan sebagai kejahatan terhadap kesejahteraan bangsa, dan negara.

Korupsi memiliki hubungan erat dengan pungutan liar. Terutama dalam kasus kemudahan pelayanan administrasi di berbagai instansi publik. Jumlah persen pungutan yang dibayarkan oleh rumah tangga untuk kemudahan pelayanan yang menunjukkan besarnya indeks persepsi korupsi di negara tersebut (*Transparency International Global 2007*).

Korupsi dapat terjadi jika ada kekuasaan monopoli yaitu kekuasaan yang dipegang oleh seseorang dan orang tersebut memiliki kemerdekaan bertindak atau wewenang yang berlebihan tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas. Berdasarkan rumusan ini, dapat diasumsikan bahwa semakin besar kekuasaan serta kewenangan yang lugs dan semakin rendah kewajiban pertanggungjawaban dari suatu institusi atau seseorang, membuat potensi korupsi yang dimiliki akan semakin tinggi (Klitgaard 2002).

Di Indonesia, korupsi timbul adanya jalur merah atau prosedur khusus yang harus dilakukan tanpa pemeriksaan fisik, adanya perijinan khusus, serta adanya keharusan oleh pegawai pemerintah lokal (Henderson dan Kuncoro 2006). Pegawai negeri di Indonesia merupakan jalinan yang lemah dalam rantai akuntabilitas publik (Bank Dunia 2004).

Kegiatan penyelidikan yang telah dilakukan KPK selama tahun 2007 sebanyak 68 kasus, kegiatan penyidikan telah dilakukan sebanyak 29 perkara, terdiri dari 8 perkara sisa tahun 2006 dan 21 perkara penyidikan tahun 2007. Telah dilakukan penuntutan 24 perkara, terdiri dari 10 perkara sisa tahun 2006 dan 14 perkara tahun 2007. Perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejumlah 21 perkara. Pelaksanaan putusan tahun 2007 adalah sejumlah 23 perkara. Jumlah uang negara yang berhasil diselamatkan KPK dihitung berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu putusan terhadap uang rampasan, uang pengganti, dan denda sebesar Rp 119.976.472.962,00 (KPK 2007).

Tabel 1 : Negara-negara yang Memiliki Partai Politik sebagai Institusi Terkorup

Kelompok Pendapatan Negara	Negara-negara yang memiliki partai
----------------------------	------------------------------------

	politik sebagai sektor terkorup
Negara berpendapatan tinggi	Austria, Canada, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Luxembourg, Portugal, South Korea, Spain, Switzerland, United Kingdom, USA
Negara berpendapatan menengah ke atas	Argentina, Chile, Costa Rica, Croatia, Czech republic, Lithuania, Mexico, Panama, Poland, South Africa, Uruguay, Venezuela
Negara berpendapatan menengah ke bawah	Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Colombia, Dominican Republic, Ecuador, Guatemala, Indonesia, Paraguay, Peru, Philippines, Romania, Serbia, Thailand
Negara berpendapatan rendah	India, Nicaragua

Sumber : *Transparency International Global Corruption Barometer 2006*.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di negara berpendapatan rendah namun juga terjadi di negara berpendapatan tinggi, menengah ke atas, dan menengah ke bawah. Dari keempat kriteria pengelompokan negara berdasarkan pendapatan tersebut, korupsi terbesar ada di institusi partai politik. Pengelompokan negara berdasarkan pendapatan menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki pendapatan menengah ke bawah. Indonesia termasuk negara dengan institusi terkorup di partai politik.

Tabel 2 : Ekspektasi Tingkat Korupsi Tiga Tahun ke Depan

Ekspektasi Tingkat Korupsi (3 tahun ke depan)	Persentase (berbobot)
Naik	54 %
Turun	20%
Tetap	26%

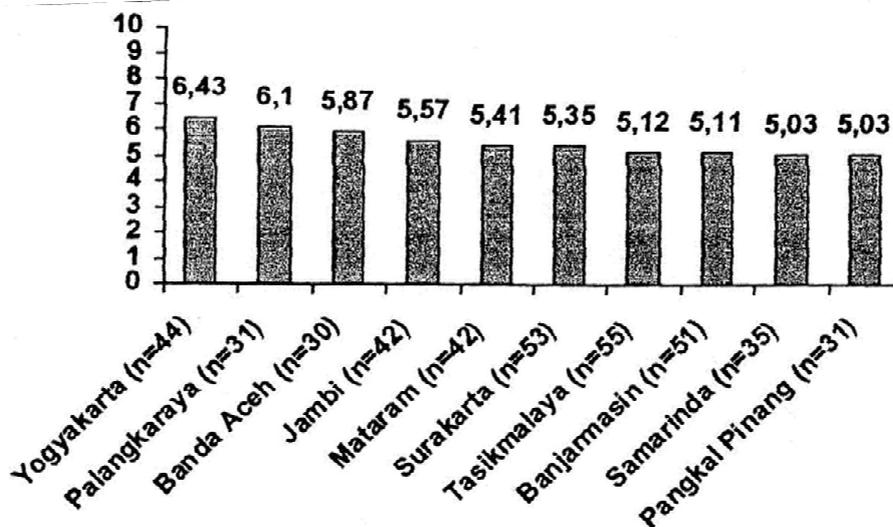
Sumber: *Transparency International Global Corruption Barometer 2007*.

Dari tabel di atas, ditunjukkan bahwa adanya perkiraan kenaikan tingkat korupsi dunia untuk tiga tahun mendatang. Dengan jumlah responder yang memilih adanya kenaikan sebesar 54%, yang memilih sama sebesar

26%, dan memilih adanya penurunan sebesar 20%.

Data statistik korupsi Indonesia sebagian besar terkait kasus pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2004. Jumlahnya mencapai 1.078 kasus atau 95,3 persen. Sedangkan, kasus yang terjadi pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, hanya ada 51 pengaduan atau 4,7 persen. Dari data di atas ada penurunan jumlah kasus korupsi di Indonesia (web Republika).

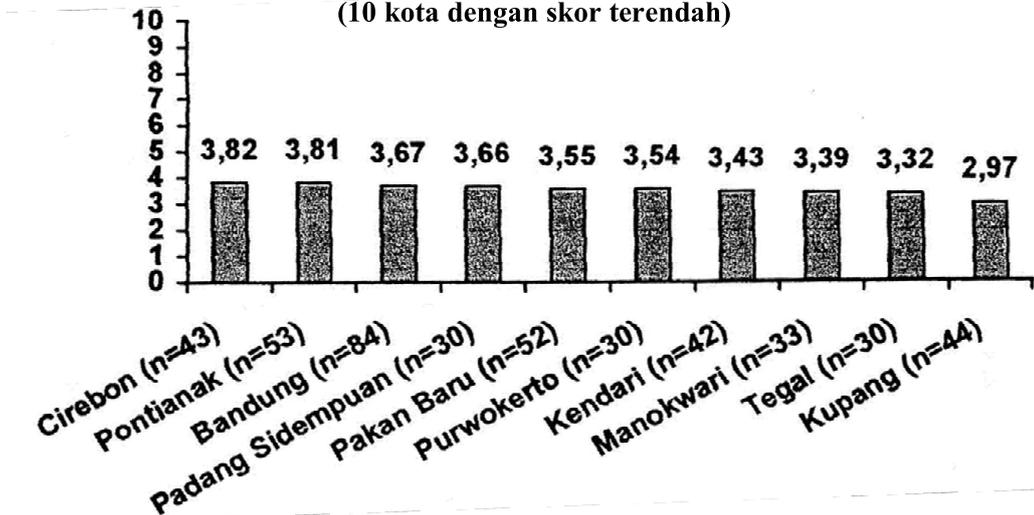
Diagram 1.
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2008
(10 kota dengan skor tertinggi)



Sumber : Transparansi Internasional Indonesia 2008.

Dari 50 kota yang disurvei dalam indeks persepsi korupsi Indonesia 2008, Yogyakarta mendapatkan skor tertinggi yaitu 6,43. Nilai tersebut dibaca bahwa pelaku bisnis di Yogyakarta menilai pemerintah daerah cukup bersih, dan cukup serius dalam usahanya memberantas korupsi. Interpretasi ini dapat menggambarkan hal yang sama di kota-kota yang berada di urutan teratas kota dengan skor tertinggi, seperti Palangkaraya (6, 1), Banda Aceh (5,87), Jambi (5,57), dan Mataram (5,41).

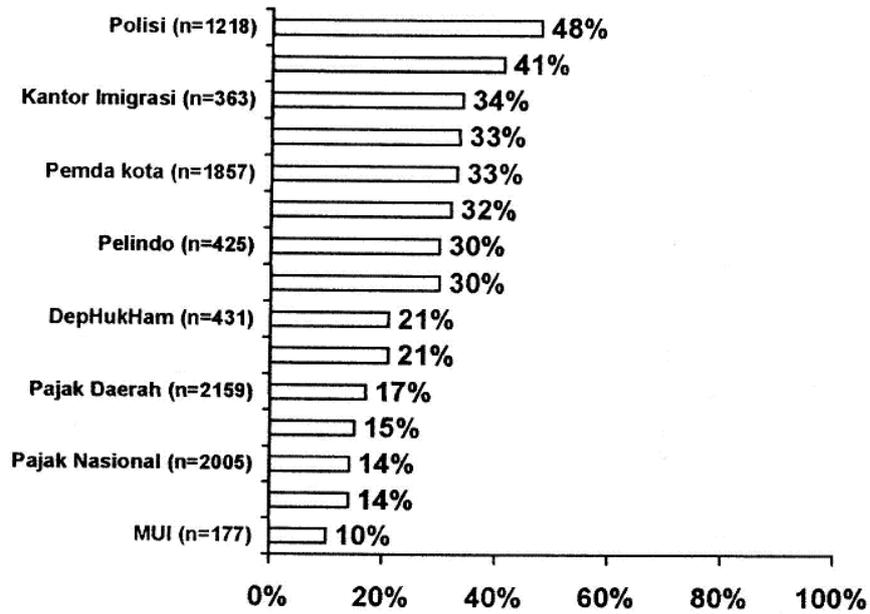
Diagram 2.
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2008
(10 kota dengan skor terendah)



Sumber : Transparansi Internasional Indonesia 2008.

Dari 50 kota yang disurvei dalam indeks persepsi korupsi Indonesia 2008, Kupang mendapatkan skor terendah (2,97), disusul Tegal (3,32), Manokwari (3,39), Kendari (3,43), dan Purwokerto (3,54). Ini menunjukkan bahwa di kota-kota ini, pelaku bisnis melihat bahwa korupsi masih sangat lazim terjadi di pemerintah daerah dan pemerintah daerah juga tidak serius dalam usaha pemberantasan korupsi. Skor terendah dicapai Kupang, karena pada tahun-tahun sebelumnya di kota ini banyak terjadi kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan anggota DPRD setempat.

Diagram 3.
Indeks Suap 15 institusi Publik Indonesia 2008



Sumber : Transparansi Internasional Indonesia 2008.

Polisi lembaga yang paling rentan suap. Dalam indeks suap, pengukuran dilakukan dengan menghitung rasio kontak antara pelaku bisnis dan institusi publik yang terjadi suap, dibanding total kontak yang terjadi. indeks suap polisi mencapai 48%, yang berarti dari total interaksi antara responder pelaku bisnis dengan institusi tersebut (n=1218), hampir setengahnya terjadi suap. Hasil ini relevan dengan hasil Barometer Korupsi Global (GCB) yang dikeluarkan Transparansi Internasional pada tahun akhir 2007 lalu. Menyusul polisi, bea cukai (41%), imigrasi (34%), DLLAJR (33%) dan pemda (33%) adalah lembaga-lembaga yang berada pada urutan paling tinggi kecenderungan terjadi suap.

Walaupun telah ada Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, tidak semua tindak korupsi dapat diberantas. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia pun belum mampu memberantas tingginya tingkat korupsi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Vasquez dkk (2004) yakni korupsi tidak dapat dihilangkan namun hanya dapat dibatasi.

Tujuan Penelitian

Untuk menguji tujuan ini, secara terinci analisis dalam penelitian ini diarahkan:

1. Untuk mengetahui faktor ekonomi yang mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan korupsi.
2. Untuk mengetahui faktor sosial yang mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan korupsi.
3. Untuk mengetahui seberapa jauh faktor ekonomi yang mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan korupsi.
4. Untuk mengetahui seberapa jauh faktor sosial yang mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan korupsi.

2. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Teori

Rose dan Ackerman (2006) mengemukakan konsep korupsi. Korupsi merupakan suatu kategori moral yang buruk. Korupsi terjadi saat kekayaan pribadi dan kekuasaan publik tumpang tindih. Hal itu, menimbulkan penyalahgunaan wewenang untuk pengambilan keputusan berdasarkan bayaran yang diterimanya. Dalam transaksi biasanya individu atau perusahaan melakukan suatu pembayaran ke pejabat publik sebagai penukar manfaat yang mereka inginkan. Uang suap meningkatkan kekayaan pribadi pejabat publik dan mempengaruhinya untuk bertindak melawan berbagai macam aturan yang ada. Tetapi suap kadang mengalir dari arch yang berlawanan : pemegang kekuasaan atau persaingan untuk membuat kantor publik hares memberikan suap kepada individu pribadi, perusahaan-perusahaan atau lainnya agar mendapatkan keuntungan-keuntungan untuk dirinya atau partai politik mereka. Dalam pathologies kedua kasus hubungan tersebut adalah dasar dari transaksi korupsi. Prosesnya dimulai dari pemberian tingkat kesempatan, sistem korupsi, yang mencakup suatu keseluruhan tingkatan birokrasi, sistem elektoral atau keseluruhan struktur pemerintahan dari atas sampai bawah. Tingkat korupsi yang rendah terjadi dalam kerangka yang memiliki hukum-hukum dasar dan aturan-aturan di suatu tempat, dan mencakup penghapusan peluang para pejabat untuk mencari manfaat bagi dirinya pribadi.

Vasquez dkk (2004) menyatakan korupsi dipertimbangkan sebagai pilihan ekonomi yang dibuat oleh pejabat. Ada dua hal yang menjadi faktor dalam korupsi yaitu elemen yang mempengaruhi motivasi dan

elemen yang mempengaruhi kesempatan untuk korupsi. Dalam teori ekonomi, jika ada insentif untuk korupsi maka ada permintaan untuk korupsi, keinginan individu untuk melakukan korupsi hanya akan sukses jika kesempatan yakni sebagai penawaran tersedia.

2. Tinjauan Jurnal : Penelitian Sebelumnya

Masalah korupsi yang sebelumnya susah dalam pencarian data, kini telah ada penelitian-penelitian yang mengacu pada permasalahan korupsi pada suatu negara maupun daerah tertentu. Hal ini memudahkan setiap akan memulai penelitian permasalahan korupsi dalam mencari acuan penelitian. Beberapa penelitian korupsi sebelumnya adalah sebagai berikut :

Vasquez dkk (2004) memaparkan tentang kebijakan keuangan serta interaksi manajemen dengan korupsi. Penelitian ini tentang estimasi keuntungan apabila seseorang melakukan korupsi. Model yang digunakan untuk mengukur ekspektasi pendapatan apabila seseorang melakukan korupsi adalah sebagai berikut:

$$E(I) - (1 - P.C)(C.B + Wg) + (P.C)(Wp - F)$$

Di situasi ini menurut mereka seseorang akan memilih nilai optimal dari korupsi (C^*), yaitu nilai korupsi yang bisa memaksimalkan pendapatannya. Optimal adalah penerimaannya lebih besar dari biaya-biaya yang mungkin dikeluarkan apabila seseorang melakukan korupsi.

Dalam ulasan berikutnya, mereka juga meneliti bahwa keputusan korupsi seseorang dipengaruhi oleh faktor motivasi dan kesempatan. Dalam penelitian ini memaparkan bahwa motivasi yang mendorong tindak korupsi adalah rendahnya gaji pegawai publik, kurangnya insentif, lemahnya budaya beretika dan kemauan berpolitik, lemahnya mekanisme pengawasan terdeteksi korupsi, dan lemahnya hukuman dan tuntutan tindak korupsi sedangkan kesempatan yang mendorong tindak korupsi adalah kekuatan monopoli, akuntabilitas atau pertanggungjawaban, dan kurangnya kontrol kerja. Model motivasi untuk korupsi dalam penelitian ini adalah :

$$B = (M.A)D$$

Di mana, B (keuntungan personal), D (keleluasan), A (tanggung jawab yang disetujui pegawai negeri atau akuntabilitas), dan M (kekuatan monopoli pegawai). Dalam penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat keleluasaan keuangan yang diberikan pada pegawai negeri, maka semakin tinggi pula kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui pencurian, penyuapan, atau bentuk-bentuk korupsi lainnya.

Shleifer dan Vishny (1993) meneliti alasan yang membuat korupsi memiliki biaya yang besar untuk pembangunan ekonomi. Alasannya adalah keberadaan uang suap untuk memperlancar semua urusan yang berkaitan dengan birokrasi pemerintahan dan adanya sejumlah uang yang digunakan untuk menutupi aksi korupsinya. Model maksimisasi penerimaan para birokrat tersebut adalah sebagai berikut:

$$MR1 + MR2 \frac{dX2}{dX1} = MC1$$

Kesimpulannya bahwa besarnya korupsi mempengaruhi besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan ekonomi. Mereka juga menyatakan bahwa kompetisi politis dan ekonomi dapat mengurangi efek buruk dan tingkat korupsi dengan adanya persaingan yang ketat.

Shordt (2008) meneliti hubungan antara desentralisasi dan korupsi dan menjelaskan bagaimana cara mencegah dan memberantas korupsi. Menurutnya, korupsi banyak terjadi di berbagai sektor akibat tidak adanya informasi dan transparansi, tidak ada cakupan produk dan jasa, tidak ada tanggung jawab dan pengawasan, tidak ada pembagian perencanaan, penganggaran dan pengawasan, juga tidak adanya kapasitas. Maka dengan faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi tersebut dipaparkan untuk pemberantasan dan pencegahan korupsi dilakukan dengan meningkatkan informasi dan transparansi, cakupan produk dan jasa, tanggung jawab dan pengawasan, pembagian perencanaan, penganggaran dan pengawasan, juga meningkatkan kapasitas.

Mocan (2008) meneliti masalah korupsi dengan data mikro dari 49 negara, di mana suap merupakan potret nyata yang menjadi kebiasaan dalam suatu negara. Hasilnya memperlihatkan bahwa karakter seseorang dan negara menentukan besarnya resiko suap.

Penjelasan analisis ekonometrika memperlihatkan bahwa suap telah digunakan lebih dari 55.000 individu dari 30 negara dengan tidak ada data yang hilang pada atribut perseorangan dan negara. Hasilnya menunjukkan bahwa karakteristik seseorang dan negara menentukan kemungkinan besarnya uang suap yang diminta. Tingginya pendidikan dan tingginya pendapatan seseorang menentukan kemungkinan besarnya uang suap yang diminta. Lelaki memiliki peluang yang lebih besar menjadi target suap karena di banyak negara lelaki memiliki aktivitas yang lebih banyak dari pada perempuan dalam pasar tenaga kerja. Hidup di kota besar memiliki resiko yang lebih besar untuk dimintai suap karena memiliki lingkup kegiatan ekonomi yang lebih luas dan menaikkan hubungan dengan pemerintah. Dalam hal berhubungan dengan pemerintah ini

seseorang harus mengeluarkan suap untuk memperlancar urusannya.

Chang dan Lai (2002) meneliti efektifitas upah mempengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan korupsi. Dalam penelitiannya, mengungkapkan, bahwa seseorang akan melakukan korupsi apabila memiliki upah yang kurang mencukupi. Penelitiannya juga mengungkapkan bahwa norma-norma sosial tidak berlaku lagi sebagai suatu sanksi. Semakin tinggi keuntungan yang didapat dengan melakukan korupsi seseorang akan cenderung mengacuhkan sanksi norma-norma sosial yang berlaku. Dalam penelitian ini, digunakan model maksimisasi penyuaipan sebagai berikut,

$$\max_B [B - S - qG][\Omega - B - qF]$$

Dengan model di atas interpretasi hasil yang didapat adalah semakin tinggi tingkat suap (B) maka semakin besar tingkat bonus (0) yang didapatkan para pekerja dari korupsi dan semakin tinggi biaya yang ditanggung para pekerja apabila melakukan korupsi maka mereka akan meminta uang suap yang lebih besar.

Di dalam penelitiannya juga menyarankan setiap instansi/tempat kerja untuk memperkuat norma untuk para pekerja dan meningkatkan upah yang sesuai produktifitas pekerja. Hal ini tidak hanya untuk mencegah perbuatan korupsi namun juga untuk mengendalikan korupsi.

Acemoglu dan Verdier (2000) meneliti adanya ruang korupsi akibat adanya campur tangan pemerintah dalam pengalokasian sumber daya ke seseorang. Dalam penelitian ini, didapatkan hasil bahwa campur tangan pemerintah memerlukan birokrat untuk mengumpulkan informasi dan implementasi kebijakan, sebagian dari agen yang termasuk pada birokrasi dapat disuap, maka mereka akan memberikan informasi yang tidak benar pada pemerintah. Karakter inilah yang dapat menimbulkan kesempatan korupsi oleh para pegawai publik dan ketidaktepatan pengalokasian sumber daya. Menurut mereka, korupsi dapat dicegah apabila birokrat dan pegawai publik mendapatkan gaji yang lebih tinggi dan adanya intervensi pemerintah yang optimal.

Fjeldstad dan Tungodden (2001) meneliti bahwa korupsi fiskal tidak mempengaruhi rendahnya tingkat pengelakan pajak dan peningkatan hasil pajak. Alasannya, peningkatan pajak akibat dari pengaruh korupsi fiskal hanya bersifat sementara secara umum justru akan menjadi kasus yang sangat panjang. Pelegalan korupsi hanya karena peningkatan penerimaan pajak yang bersifat sementara merupakan cara yang salah. Mereka juga menyatakan bahwa korupsi harus tetap, diberantas demi

efisiensi dan efektifitas birokrasi pemerintahan yang lebih baik.

Berdasarkan beberapa penelitian dalam studi literatur di atas didapatkan beberapa kesimpulan. Pertama, bahwa korupsi adalah gabungan motivasi dan kesempatan. Kedua, motivasi korupsi didorong oleh beberapa faktor yakni rendahnya pendapatan pegawai, kurangnya insentif, lemahnya mekanisme pemantauan atau pengawasan terdeteksi korupsi, lemahnya hukuman dan tuntutan tindak korupsi, dan lemahnya budaya beretika. Ketiga, kesempatan korupsi didorong oleh beberapa faktor yakni kekuatan monopoli, lemahnya akuntabilitas atau pertanggungjawaban, dan keleluasaan pegawai atau lemahnya sistem kontrol kerja. Keempat, Pelaku tindak korupsi akan melakukan korupsi apabila keuntungan tindak korupsi lebih besar dari biaya tindak korupsi. Kelima, adanya pengaruh keterkaitan tingkat gaji terhadap tingkat korupsi.

3. Metoda Penelitian

Model yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah modifikasi dari model Varquez dkk (2004). Penelitian ini menggunakan dua buah model, di mana korupsi merupakan penggabungan dari kesempatan dan motivasi. Motivasi adalah pendapatan, pengetahuan hukum korupsi, dan sistem terdeteksinya korupsi. Kesempatan adalah monopoli, akuntabilitas, dan sistem kontrol kerja. Maka model penelitian ini sebagai berikut :

1. Model Linier

$$P_c = \beta_0 + \beta_1 Y + \beta_2 HK + \beta_3 TK + \beta_4 M + \beta_5 A + \beta_6 Di + e_i$$

Dimana :

- Pc : Probabilitas korupsi
- y : Pendapatan responder
- HK : Pengetahuan hukum korupsi yang berlaku
- TK : Kontrol terdeteksinya korupsi
- M : Monopoli
- A : Akuntabilitas atau pertanggungjawaban
- Di : Keleluasaan pegawai atau sistem kontrol kerja

Pc merupakan naiknya probabilitas korupsi sebagai akibat kesempatan dan motivasi tindak korupsi yang dimiliki seseorang. Untuk variabel dependen (Pc) angka 1 berarti seseorang memiliki keinginan untuk korupsi sedangkan angka 0 berarti seseorang tidak memiliki keinginan untuk korupsi. Untuk koefisien variabel $\beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$ probabilitas berkisar antara 0 hingga 1. Untuk variabel pendapatan (Y), H0

diterima apabila pendapatan tidak berpengaruh terhadap keinginan seseorang untuk melakukan korupsi sedangkan H1 diterima apabila pendapatan berpengaruh terhadap keinginan seseorang untuk melakukan korupsi. Untuk variabel kontrol terdeteksinya korupsi (TK), akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang disetujui pegawai negeri (A), dan keleluasaan pegawai atau sistem kontrol kerja (Di) angka 0 berarti variabel tersebut mempengaruhi keinginan seseorang, untuk melakukan korupsi sedangkan angka 1 berarti variabel tersebut tidak mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan korupsi. Untuk variabel monopoli (M) angka 1 berarti variabel tersebut mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan korupsi sedangkan angka 0 berarti variabel tersebut tidak mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan korupsi.

2. Model Kuadratik

$$P_c = \beta_0 + \beta_1 Y^2 + \beta_2 HK + \beta_3 TK + \beta_4 M + \beta_5 A + \beta_6 Di + e_i$$

Dimana :

- Pc : Probabilitas korupsi
- Y² : Pendapatan responder yang dikuadratkan
- HK : Pengetahuan hukum korupsi yang berlaku
- TK : Kontrol terdeteksinya korupsi
- M : Monopoli
- A : Akuntabilitas atau pertanggungjawaban
- Di : Keleluasaan pegawai atau sistem kontrol kerja

Pc merupakan naiknya probabilitas korupsi sebagai akibat kesempatan dan motivasi tindak korupsi yang dimiliki seseorang. Untuk variabel dependen (PC) angka 1 berarti seseorang memiliki keinginan untuk korupsi sedangkan angka 0 berarti seseorang tidak memiliki keinginan untuk korupsi. Untuk koefisien variabel $\beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$ probabilitas berkisar antara 0 hingga 1. Untuk variabel pendapatan yang dikuadratkan (Y²), H0 diterima apabila pendapatan yang dikuadratkan tidak berpengaruh terhadap keinginan seseorang untuk melakukan korupsi sedangkan H1 diterima apabila pendapatan yang dikuadratkan berpengaruh terhadap keinginan seseorang untuk melakukan korupsi sedangkan. Untuk variabel kontrol terdeteksinya korupsi (TK), akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang disetujui pegawai negeri (A), dan keleluasaan pegawai atau sistem kontrol kerja (Di) angka 0 berarti variabel tersebut mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan

korupsi sedangkan angka 1 berarti variabel tersebut tidak mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan korupsi. Untuk variabel monopoli (M) angka 1 berarti variabel tersebut mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan korupsi sedangkan angka 0 berarti variabel tersebut tidak mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan korupsi.

Hipotesis Penelitian

1. Tingkat pendapatan seseorang mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan korupsi.
2. Tingkat pendapatan memiliki titik minimum dalam mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan korupsi.
3. Pengetahuan hukum korupsi yang dimiliki seseorang, mempengaruhi tingkat keinginan seseorang untuk melakukan korupsi.
4. Lemahnya sistem terdetesinya korupsi dalam suatu negara, mempengaruhi tingkat keinginan seseorang untuk melakukan korupsi.
5. Tingginya monopoli yang dimiliki seseorang di instansi atau tempat kerja, mempengaruhi tingkat keinginan seseorang untuk melakukan korupsi.
6. Lemahnya akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang dimiliki instansi kerja, mempengaruhi tingkat keinginan seseorang untuk melakukan korupsi.
7. Lemahnya kontrol kerja sehingga mengakibatkan keleluasaan seseorang di instansi atau tempat kerja, mempengaruhi tingkat keinginan seseorang untuk melakukan korupsi.
8. Motivasi dan kesempatan korupsi yang dimiliki seseorang mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan korupsi.

Penelitian Sampel

Alasan mengambil sampel mahasiswa S2 Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM yang telah bekerja adalah:

1. Mahasiswa S2 FEB UGM yang telah bekerja lebih memiliki pengetahuan tentang teori ekonomi secara akademisi khususnya tentang rasionalitas.
2. Mahasiswa S2 FEB UGM yang telah bekerja berasal dari latar belakang sosial yang berbeda-beda. Terutama dari segi pekerjaan dan pendapatan.
3. Mahasiswa S2 FEB UGM yang telah bekerja secara tidak langsung berpeluang memiliki motivasi dan kesempatan untuk tindak korupsi. Mahasiswa S2 FEB UGM yang telah bekerja memiliki tingkat kekuasaan dalam pekerjaannya, memiliki pendapatan dari pekerjaannya, memiliki kebutuhan akan pemenuhan hidup, telah melakukan kegiatan ekonomi, dan faktor-faktor ekonomi dan sosial lain yang mendorong peluang tindak

korupsi.

Jumlah mahasiswa S2 Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM di Yogyakarta yang tercatat aktif saat pengambilan sampel (hingga April 2009) sebanyak 1705 orang. Jumlah ini merupakan akumulasi dari seluruh angkatan baik pria maupun wanita. Responder observasi terdiri dari empat jenjang studi S2 FEB UGM yakni mahasiswa S2 dari MSi, MEP, MM, dan MAKSI Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM di Yogyakarta.

Dalam pengambilan sampel, metoda stratifikasi digunakan pada penelitian ini. Metoda stratifikasi digunakan karena satuan-satuan elementer dalam populasi tidak homogen. Jumlah sampel diambil dari keempat jenjang studi S2 Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM di Yogyakarta. Pengambilan sampel menggunakan rumus ukuran sampel sebagai berikut (Slavin 1995):

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Keterangan :

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

d : level signifikansi atau alpha yang diinginkan (umumnya 0,05 untuk bidang non-eksak dan 0,01 untuk bidang eksakta).

Jumlah sampel yang didapatkan dari rumus di atas adalah 324 responden. Total keseluruhan observasi yang disertakan dalam penelitian berjumlah 315 observasi.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Data pendapatan pegawai
2. Data pengetahuan hukum korupsi di Indonesia
3. Data sistem terdetektesinya korupsi
4. Data monopoli
5. Data akuntabilitas atau pertanggungjawaban
6. Data keleluasaan pegawai atau sistem kontrol kerja
7. Data keputusan melakukan korupsi

Korupsi memiliki berbagai definisi, berikut adalah beberapa definisi korupsi :

1. Menurut Transparansi Internasional

Korupsi adalah perilaku pejabat publik, politikus atau pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

2. Menurut Bank Dunia 1997

Korupsi adalah meliputi derajat penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi dan menuntut pembayaran tidak sah.

3. Menurut kamus bahasa Inggris

Korupsi adalah perbuatan tidak wajar atau pembinasaaan ketepatan atau integritas dalam tugas publik dengan penyuapan.

Alat Analisis

Dengan menggunakan analisis dan model probabilitas. Pemilihan model yang digunakan terkait dengan data yang didapat. Model probabilitas digunakan karena variabel dependen menangkap respon kualitatif dan merupakan bilangan biner antara 1 untuk jawaban ya dan 0 untuk jawaban tidak. Apabila data yang diperoleh berdistribusi normal maka menggunakan model probit namun apabila tidak berdistribusi normal menggunakan model logit. Maka sebelum pemilihan model, perlu menguji data yang didapat terdahulu dengan uji normalitas. Model beserta variabel-variabel yang akan digunakan disesuaikan dengan penelitian-penelitian oleh para peneliti masalah korupsi sebelumnya.

1. Uji Normalitas

Ada beberapa uji untuk mengetahui normal atau tidaknya faktor gangguan variabel antara lain Jarque-Bera test atau J-B test. Uji ini menggunakan estimasi variabel dan *chisquare probability distribution*. Hipotesis yang digunakan dalam uji normalitas adalah :

HO : variabel berdistribusi normal

Ha : variabel tidak berdistribusi normal

Rumus yang digunakan untuk menghitung J-B hitung adalah sebagai berikut:

$$JB = n \left[\frac{S^2}{6} + \frac{(K - 3)^3}{24} \right]$$

Dimana :

n : jumlah sampel

K : koefisien kurtosis

S : koefisien skewness

Jika nilai J-B hitung > nilai X^2 tabel (1df dengan 0,05), maka H0 ditolak dan Jika nilai J-B hitung < nilai '-' tabel(1df dengan 0,05), maka HO diterima atau jika probabilita dari J-B hitung > 0,05 maka HO diterima dan jika probabilita dari J-B hitung < 0,05 maka HO ditolak (Gujarati

2003).

2. Model Probit

Probit digunakan karena model probit merupakan model yang tepat untuk melakukan penelitian terhadap perspektif pilihan rasional pada perilaku (Gujarati 2003). Probit akan menghasilkan variabel terikat yang berbentuk probabilitas antara 0 dan 1. Probit menggunakan normal cumulative distribution function (CDF).

Untuk menginterpretasi data berdasarkan model probit maka harus menggunakan tabel distribusi normal untuk mengetahui probabilitasnya (Amemiya 1981; Gujarati 2003; Winarno 2007).

$$I_i = \beta_1 + \beta_2 X_i \quad (1)$$

Di mana semakin besar I_i maka semakin besar pula probabilitasnya. Jika $I_i \geq I_i^*$ maka berarti ya sedangkan $I_i \leq I_i^*$ maka berarti tidak. Dengan asumsi normalitas, probabilitas I_i yang lebih kecil atau sama dengan I_i dapat dihitung berdasarkan distribusi normal sebagai berikut :

$$P_i = P(Y_i = 1 / X_i) = P(I_i^* \leq I_i) = P(Z_i \leq \beta_1 + \beta_2 X_i) = F(\beta_1 + \beta_2 X_i) \quad (2)$$

$P(Y_i=1/X)$ merupakan probabilitas terjadinya peristiwa pada suatu nilai X (variabel independen) dan Z_i adalah variabel normal standar yaitu $Z_i \sim N(0, \sigma^2)$. F adalah CDF (*cumulative distribution function*) normal standar yang dapat dituliskan :

$$\begin{aligned} f(I_i) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{I_i} e^{-z^2/2} dz \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{-\infty}^{\beta_1 + \beta_2 X_i} e^{-z^2/2} dz \end{aligned} \quad (3)$$

Maka untuk mengukurnya diperlukan efek marjinal untuk probit (Gujarati 2003; Winarno 2007). Akan tetapi untuk menginterpretasi koefisien dari model probit diperlukan efek marjinal untuk probit (Liao 1994). Secara matematis efek marjinal dituliskan sebagai berikut:

$$\frac{\partial \text{Prob}(Y = 1)}{\partial x_k} = \Phi \left(\sum_{k=1}^k \beta_k x_k \right) \beta_k$$

∂ merupakan turunan parsial atau efek marjinal, P adalah Prob (y=1), dan (1-P) merepresentasikan Prob (y = 0).

3. Model Logit

Pada model logit, variabel dependen terdiri atas bilangan biner 0 dan 1 (mewakili kondisi ya dan tidak). Interpretasi pada model logit menunjukkan besarnya kemungkinan suatu kejadian, yang ditunjukkan dengan presentase probabilitas, sehingga nilainya antara 0% hingga 100% (Winarno 2007).

$$P_i = E(Y = 1 | X_i) = \frac{1}{1 + e^{-\beta_1 + \beta_2 x_i}} \quad (1)$$

Persamaan di atas dapat disederhanakan menjadi :

$$P_i = \frac{1}{1 + e^{-z}} = \frac{e^z}{1 + e^z} \quad (2)$$

Dengan $Z_i = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n$ Persamaan (2) ini dikenal dengan fungsi distribusi logistik kumulatif (*cumulative logistic distribution function*).

Model yang digunakan dalam analisis logit adalah sebagai berikut

$$L_i = \ln \left(\frac{p_i}{1 - p_i} \right) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n$$

Di mana p adalah probabilitas seseorang memilih nilai variabel dependen. 1. Akan tetapi untuk menginterpretasi koefisien dari model logit diperlukan efek marjinal untuk logit (Liao 1994). Secara matematis efek marjinal untuk logit dituliskan sebagai berikut:

$$\frac{\partial \text{Prob}(Y = 1)}{\partial x_k} = \frac{\sum_{k=1}^k \beta_k x_k}{\left(1 + e^{\sum_{k=1}^k \beta_k x_k} \right)^2} \beta_k = P(1 - P) \beta_k$$

∂ merupakan turunan parsial atau efek marjinal, P adalah Prob (Y=).

Uji Statistik

1. Uji z (Uji Koefisien Regresi Secara Individual)

Uji z digunakan untuk membuktikan signifikansi koefisien regresi suatu model secara statistik (Lind 2006). Penghitungan z statistik dapat dituliskan secara matematis sebagai berikut:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$

Jika nilai z absolut lebih besar dari nilai kritis z pada tabel distribusi z dengan derajat kebebasan tertentu maka hipotesis nol ditolak. Hal ini berarti koefisien regresi secara individual signifikan berpengaruh pada variabel terikat. Jika nilai z absolut lebih kecil dari nilai kritis z pada tabel distribusi t dengan derajat kebebasan tertentu maka hipotesis nol gagal ditolak. Hal ini berarti variabel independen secara individual tidak signifikan berpengaruh pada variabel terikat.

2. Uji Likelihood Ratio (LR)

Uji LR digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi mempengaruhi variabel terkait secara serempak (Maddala 2001). Penggunaan Uji LR pada Maximum Likelihood sama dengan penggunaan uji F pada OLS.

Hipotesis dalam uji LR yaitu:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 \dots = \beta_k = 0$$

Selain H_0 adalah H_1 . Secara matematis uji LR dituliskan sebagai berikut:

$$LR = 2(L_{ur} - L_r)$$

Dimana L_{ur} adalah nilai likelihood dari model tanpa restriksi dan L_r adalah nilai likelihood dengan restriksi.

3. Uji R^2 McFadden (Uji Koefisien Determinasi McFadden)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur proporsi atau presentase dari total variasi dalam Y dapat dijelaskan oleh model regresi (Maddala 2001). Akan tetapi koefisien determinasi konvensional (R^2)

kurang berarti maksimal pada model *maximum likelihood*. Untuk model jenis ini digunakan beberapa bentuk koefisien determinasi yang lain. Pada penelitian ini digunakan koefisien determinasi McFadden. Hasil dari uji R² McFadden akan bernilai antara 0 hingga 1. Secara matematis uji R² dituliskan sebagai berikut :

$$McFadden \text{ 's} R = 1 - \frac{\text{Log } LUR}{\text{Log } LUR}$$

L_{UR} merupakan fungsi maximum likelihood saat termaksimalkan dengan seluruh parameter. L_R fungsi maximum likelihood saat termaksimalkan dengan restriksi B_i = 0 untuk I = 1, 2,, k.

4. Hasil dan Pembahasan

Uji Normalitas

1. Untuk Variabel Probabilitas Korupsi (Pc)

Probability dari tes J-13 adalah 0.000000 yang berarti probability dari J-B hitung lebih kecil dari 0,05 atau nilai J-B hitung adalah 53.66893 lebih besar dari nilai X² tabel (1 df dengan 0,05) yakni 7,87944 maka H₀ ditolak. Dengan kata lain, data variabel keinginan korupsi (Pc) ini tidak berdistribusi normal.
2. Untuk Variabel pendapatan (Y)

Probability dari tes J-B adalah 0.000000 yang berarti probabilita dari J-13 hitung lebih kecil dari 0,05 atau nilai J-B hitung adalah 38.23051 lebih besar dari nilai X² tabel (1df dengan 0,05) yakni 7,87944 maka H₀ ditolak. Dengan kata lain, data variabel pendapatan (Y) ini tidak berdistribusi normal.
3. Untuk Variabel Pengetahuan Hukum Korupsi (Hk)

Probabilita dari tes J-B adalah 0.000014 yang berarti probabilita dari J-B hitung lebih kecil dari 0,05 atau nilai J-B hitung adalah 22.28896 lebih besar dari nilai X² tabel (1df dengan 0,05) yakni 7,87944 maka H₀ ditolak. Dengan kata lain, data variabel pengetahuan hukum korupsi (Hk) ini tidak berdistribusi normal.
4. Untuk Variabel Terdeksesinya korupsi (Tk)

Probabilita dari tes J-B adalah 0.000000 yang berarti probabilita dari J-B hitung lebih kecil dari 0,05 atau nilai J-B hitung adalah 91.67305 lebih besar dari nilai X² tabel (1df dengan 0,05) yakni 7,87944 maka H₀ ditolak. Dengan kata lain, data variabel terdeksesinya korupsi ini tidak

berdistribusi normal.

5. Untuk Variabel Monopoli (M)

Probabilitas dari tes J-B adalah 0.000000 yang berarti probabilitas dari J-B hitung lebih kecil dari 0,05 atau nilai J-B hitung adalah 54.80462 lebih besar dari nilai X^2 tabel (1df dengan 0,05) yakni 7,87944 maka H_0 ditolak. Dengan kata lain, data variabel monopoli (M) ini tidak berdistribusi normal.

6. Untuk Variabel Akuntabilitas (A)

Probabilitas dari tes J-B adalah 0.000000 yang berarti probabilitas dari J-B hitung lebih kecil dari 0,05 atau nilai J-B hitung adalah 59.29656 lebih besar dari nilai X^2 tabel (1df dengan 0,05) yakni 7,87944 maka H_0 ditolak. Dengan kata lain, data variabel akuntabilitas (A) ini tidak berdistribusi normal.

7. Untuk Variabel Sistem Kontrol Kerja atau Keleluasaan Kerja (Di)

Probabilitas dari tes J-B adalah 0.000000 yang berarti probabilitas dari J-B hitung lebih kecil dari 0,05 atau nilai J-B hitung adalah 63.92838 lebih besar dari nilai X^2 tabel (1df dengan 0,05) yakni 7,87944 maka H_0 ditolak. Dengan kata lain, data variabel keleluasaan kerja (Di) ini tidak berdistribusi normal.

8. Untuk Variabel Pendapatan yang Dikuadratkan (Y2)

Probabilitas dari tes J-B adalah 0.000000 yang berarti probabilitas, dari J-B hitung lebih kecil dari 0,05 atau nilai J-B hitung adalah 76.99506 lebih besar dari nilai X^2 Label (1df dengan 0,05) yakni 7,87944 maka H_0 ditolak. Dengan kata lain, data pendapatan yang dikuadratkan (Y2) ini tidak berdistribusi normal.

Dengan melihat hasil uji normalitas di atas, kedelapan variabel tidak berdistribusi normal maka model analisis yang diambil dalam penelitian ini adalah model logit.

Hasil Regresi dan Analisis Model Logit

1. Untuk model tinier

Dengan menggunakan model logit maka hasil regresi yang didapat adalah sebagai berikut:

Berdasarkan data tersebut variabel keinginan melakukan korupsi (Pc) sebagai variabel dependen, sedangkan variabel pendapatan (Y), Pengetahuan hukum korupsi (Hk), sistem terdeteksinya korupsi (Tk), monopoli (M), akuntabilitas atau pertanggungjawaban (A), dan kontrol kerja atau keleluasaan kerja (Di) merupakan variabel independen- Variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen ada empat variabel yakni variabel pendapatan (Y), monopoli (M), akuntabilitas

atau pertanggungjawaban (A), dan kontrol kerja atau keleluasaan kerja (Di) karena Z hitungnya berada di atas nilai kritis 5% Z tabel. Sedangkan variabel pengetahuan hukum korupsi (Hk) dan sistem terdeteksinya korupsi (Tk) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen karena Z hitungnya berada di bawah nilai kritis 5% Z tabel.

Tabel 3 : Hasil Regresi Model Motivasi dan Kesempatan Korupsi

Variabel dependen : Pc			
Variabel independen	Koefisien	Z statistik	Signifikansi
C	3.429739	2.669567	
Y	-4.9	-2.447970	Variabel signifikan mempengaruhi variabel dependen karena di atas nilai kritis 5% Z tabel.
HK	-0,143323	-0.925905	Variabel tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen karena di bawah nilai kritis 5% Z tabel.
TK	-1.771394	-1.935777	Variabel tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen karena di bawah nilai kritis 5% Z tabel.
M	1.777356	3.759145	Variabel signifikan mempengaruhi variabel dependen karena di atas nilai kritis 5% Z tabel.
A	-3.151650	-3.673610	Variabel signifikan mempengaruhi variabel dependen karena di atas nilai kritis 5% Z tabel.
Di	-2,470571	-2.588514	Variabel signifikan mempengaruhi variabel dependen karena di atas nilai kritis 5% Z tabel.

Sumber : Data primer (diolah)

Tabel 4: Hasil Regresi LR Statistik dan R2 McFadden

LR statistic (5do)	266.666
R 2 McFadden	0.643264

Sumber: Data primer (diolah).

Nilai R^2 McFadden sebesar 0.643264 menunjukkan bahwa variabel independen secara kuat menjelaskan variabel dependen pada model ini. Selain itu untuk nilai LR statistik sebesar 266.666 berarti secara bersama-sama semua regresor berpengaruh secara signifikan terhadap hasil akhir karena nilai LR statistiknya ($266.666 > p \text{ value-nya}$ (0.000000)).

Tabel 5: Efek Marjinal

Variabel	Efek Marjinal
Y	1,152
Hk	0,03
Tk	0,43
M	0,43
A	0,75
Di	0,59

Sumber : data primer (diolah).

Seperti terlihat pada Tabel 5. variabel pendapatan (Y) mempunyai nilai efek marjinal sebesar 1,152. Hal ini berarti, bila pendapatan responden naik Rp. 100,00 maka menurunkan probabilitas keinginan responden untuk melakukan korupsi sebesar 115,2 persen, dengan variabel lain dianggap tetap. Hal ini sejalan dengan penelitian Vasquez dkk (2004) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan korupsi.

Pada variabel Monopoli (M) efek marjinal bernilai 0,43. Hal ini berarti tiap kenaikan besaran tingkat Monopoli satu satuan maka probabilitas responden tersebut untuk melakukan korupsi akan naik 43 persen, dengan variabel lain dianggap tetap. Hal ini sejalan dengan penelitian Vasquez dkk (2004) yang menyatakan bahwa monopoli mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan korupsi.

Pada variabel akuntabilitas atau pertanggungjawaban (A) efek marjinal bernilai 0,75. Hal ini berarti tiap kenaikan besaran tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban satu satuan maka probabilitas responden tersebut untuk melakukan korupsi akan turun 75 persen, dengan variabel lain dianggap tetap. Hal ini sejalan dengan penelitian Vasquez dkk (2004) yang menyatakan bahwa akuntabilitas mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan korupsi.

Pada variabel lemahnya kontrol kerja atau keleluasaan kerja (Di) efek marjinal bernilai 0,59. Hal ini berarti tiap kenaikan besaran tingkat kontrol kerja atau keleluasaan kerja satu satuan maka probabilitas

responden tersebut untuk melakukan korupsi akan turun 59 persen, dengan variabel lain dianggap tetap. Hal ini sejalan dengan penelitian Vasquez dkk (2004) yang menyatakan bahwa sistem kontrol kerja mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan korupsi.

Dari hasil model logit di atas, maka fungsi persamaannya adalah

$$P_c = 3,43 - 4,8Y - 0,14HK - 1,78TK + 1,78M - 3,15A - 2,47 Di$$

Interpretasi hasil regresi logit di atas adalah, bila seseorang yang telah bekerja memiliki fakta sebagai berikut:

- Pendapatan (Y) sebesar Rp. 1.000.000,00
- Pengetahuan korupsi (Tk) sebesar 0.
- Setuju bahwa lemahnya sistem terdeteksinya korupsi (Tk) mempengaruhi seseorang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi adalah 0.
- Setuju bahwa kepemilikan monopoli (M) mempengaruhi seseorang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi adalah 1.
- Setuju bahwa lemahnya akuntabilitas atau pertanggungjawaban instansi atau tempat kerja (A) mempengaruhi seseorang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi adalah 0.
- Setuju bahwa lemahnya kontrol kerja pegawai sehingga menimbulkan keleluasaan pegawai di tempat kerja (Di) mempengaruhi seseorang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi adalah 0.

Maka probabilitas seseorang tersebut untuk melakukan korupsi adalah:

$$P_c = \text{Ln} \left(\frac{P_c}{1 - P_c} \right) = 3,43 - 4,8(1) - 0,14(0) - 1,78(0) + 1,78(1) - 3,15(0) - 2,47(0) = 0,41$$

$$\left(\frac{P}{1 - P} \right) = e^{0,41} = 1,51$$

$$P = \frac{1,51}{1 + 1,51} = 0,50 = 50\%$$

Berdasarkan interpretasi data di atas maka seseorang tersebut memiliki probabilitas 50 persen untuk melakukan korupsi. Respon responden yang memiliki persepsi keinginan untuk korupsi sebesar 50 persen berdasarkan jumlah responden yang memilih ya untuk keinginan melakukan korupsi.

2. Untuk model kuadratik

Dengan menggunakan model logit maka hasil regresi yang didapat adalah sebagai berikut:

Tabel 6: Hasil Regresi Model Motivasi dan Kesempatan Korupsi

Variabel dependen : Pc			
Variabel independen	Koefisien	Z statistik	Signifikansi
C	2.116320	2.359759	
Y2	-4.3	-1.964923	Variabel signifikan mempengaruhi variabel dependen karena di atas nilai kritis 5% Z tabel.
Hk	-0.085213	-0.676082	Variabel tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen karena di atas nilai kritis 5% Z tabel.
TK	0.175607	0.258656	Variabel tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen karena di bawah nilai kritis 5% Z tabel.
M	0.781323	2.037483	Variabel signifikan mempengaruhi variabel dependen karena di bawah nilai kritis 5% Z tabel.
A	-1.881214	-4.531396	Variabel signifikan mempengaruhi variabel dependen karena di bawah nilai kritis 5% Z tabel.
Di	-1.876216	-3.128752	Variabel signifikan mempengaruhi variabel dependen karena di atas nilai kritis 5% Z tabel.

Sumber-Data primer (diolah).

Berdasarkan data di atas variabel probabilitas melakukan korupsi (Pc) sebagai variabel dependen, sedangkan variabel pendapatan (Y2), pengetahuan hukum korupsi (Hk), sistem terdeteksinya korupsi (Tk), monopoli (M), akuntabilitas atau pertanggungjawaban (A), dan kontrol kerja atau keleluasaan kerja (Di) merupakan variabel independen. Variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen ada empat variabel yakni variabel pendapatan (Y2), monopoli (M), akuntabilitas atau pertanggungjawaban (A) dan kontrol kerja atau keleluasaan kerja (Di) karena Z hitungnya berada di atas nilai kritis 5% Z

tabel. Sedangkan variabel pengetahuan hukum korupsi (M) dan sistem terdeteksinya k-orups]. (Tk) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen karena Z hitungannya berada di bawah nilai kritis 5% Z tabel.

Tabel 7: Hasil Regresi LR Statistik dan R² McFadden

LR statistic (5do	239.0591
W McFadden	0,576668

Sumber : Data primer (diolah).

Nilai R² McFadden sebesar 0.576668 menunjukkan bahwa variabel independen secara kuat menjelaskan variabel dependen pada model ini. Selain itu untuk nilai LR statistik sebesar 239.0591 berarti secara bersama-sama semua regresor berpengaruh secara signifikan terhadap hasil akhir karena nilai LR statistiknya ($239.0591 > p \text{ value-nya } (0,000000)$)

Tabel 8: Efek Marjinal

Variabel	Efek Marjinal
Y2	0,69
Hk	0,013
Tk	0,03
M	0,12
A	0,30
Di	0,30

Sumber : data primer (diolah).

Seperti terlihat pada Tabel 8. variabel pendapatan (Y2) mempunyai nilai efek marjinal sebesar 0,69. Hal ini berarti, bila pendapatan responden naik Rp. 100,00 maka menurunkan probabilitas keinginan responder untuk melakukan korupsi sebesar 69 persen, dengan variabel lain dianggap tetap. Hal ini sejalan dengan penelitian Vasquez dkk (2004) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan korupsi.

Pada variabel Monopoli (M) efek marjinal bernilai 0,12. Hal ini berarti tiap kenaikan besaran tingkat Monopoli satu satuan maka probabilitas responden tersebut untuk melakukan korupsi akan naik 12 persen, dengan variabel lain dianggap tetap. Hal ini sejalan dengan penelitian Vasquez dkk (2004) yang menyatakan bahwa monopoli

mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan korupsi.

Pada variabel akuntabilitas atau pertanggungjawaban (A) efek marginal bernilai 0,30. Hal ini berarti tiap kenaikan besaran tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban satu satuan maka probabilitas responden tersebut untuk melakukan korupsi akan turun 30 persen, dengan variabel lain dianggap tetap. Hal ini sejalan dengan penelitian Vasquez dkk (2004) yang menyatakan bahwa akuntabilitas mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan korupsi.

Pada variabel lemahnya kontrol kerja atau keleluasaan kerja (Di) efek marginal bernilai 0,30. Hal ini berarti tiap kenaikan besaran tingkat kontrol kerja atau keleluasaan, kerja satu satuan maka probabilitas responden tersebut untuk melakukan korupsi akan turun 30 persen, dengan variabel lain dianggap tetap. Hal ini sejalan dengan penelitian Vasquez dkk (2004) yang menyatakan bahwa sistem kontrol kerja mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan korupsi.

Dari hasil model logit di atas, maka fungsi persamaannya adalah $P_c = 2,12 - 4,3Y_2 - 0,08HK + 0,17TK + 0,78M - 1,88A - 1,88Di$

Interpretasi hasil regresi logit di atas adalah bila seseorang yang telah bekerja memiliki fakta sebagai berikut:

- a. Pendapatan (Y) sebesar Rp1.000.000,00.
- b. Pengetahuan korupsi (Hk) sebesar 0.
- c. Setuju bahwa sistem lemahnya sistem terdeteksinya korupsi (Tk) mempengaruhi seseorang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi adalah 0.
- d. Setuju bahwa kepemilikan monopoli (M) mempengaruhi seseorang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi adalah 1.
- e. Setuju bahwa lemahnya akuntabilitas atau pertanggungjawaban instansi kerja (A) mempengaruhi seseorang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi adalah 0.
- f. Setuju bahwa lemahnya kontrol kerja pegawai sehingga menimbulkan keleluasaan pegawai di tempat kerja (Di) mempengaruhi seseorang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi adalah 0.

Maka probabilitas seseorang tersebut untuk melakukan korupsi adalah:

$$P_c = \text{Ln} \left(\frac{P_c}{1 - P_c} \right) = 2,12 - 4,3(1)^2 - 0,08(0) + 0,17(0) + 0,78(1) - 1,88(0) - 1,88(0)$$

$$= -1,4$$

$$\left(\frac{P}{1-P}\right) = e^{1,4} = 0,25$$

$$P = \frac{0,25}{1+0,25} = 0,2 = 20\%$$

Berdasarkan interpretasi data di atas maka seseorang tersebut memiliki probabilitas 20 persen untuk melakukan korupsi. Dari model kuadratik di atas, pendapatan (Y2) memiliki titik minimum dalam mempengaruhi probability keputusan seseorang untuk melakukan korupsi (Pc). Hal ini sejalan dengan penelitian Chang dan Lai (2002).

Respon responden yang memiliki persepsi keinginan untuk korupsi sebesar 63 persen berdasarkan jumlah responden yang memilih ya untuk keinginan melakukan korupsi.

5. Simpulan dan Saran

Simpulan

Faktor ekonomi yang mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan korupsi secara signifikan adalah pendapatan.

Faktor sosial yang mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan korupsi secara signifikan adalah monopoli, akuntabilitas, dan sistem kontrol kerja.

Seberapa jauh faktor ekonomi yakni pendapatan yang mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan korupsi adalah semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka probabilitas keinginan seseorang untuk melakukan korupsi semakin rendah. Pendapatan memiliki titik minimum dalam mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan korupsi.

Seberapa jauh faktor sosial yakni monopoli, akuntabilitas, dan sistem kontrol kerja yang mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan korupsi adalah sebagai berikut

1. Semakin tinggi monopoli seseorang maka probabilitas keinginan seseorang untuk melakukan korupsi semakin tinggi.
2. Semakin tinggi akuntabilitas tempat atau instansi kerja seseorang maka probabilitas keinginan seseorang untuk melakukan korupsi semakin rendah.
3. Semakin tinggi sistem kontrol atau pengawasan di instansi kerja seseorang maka probabilitas keinginan seseorang untuk melakukan korupsi semakin rendah.

Saran

Pemberlakuan insentif atau bonus dan hukuman maupun sanksi berdasarkan perilaku para pegawai dalam sebuah institusi atau tempat kerja untuk mencegah korupsi.

Penyetaraan dan peningkatan komitmen dan kualitas pegawai swasta, pegawai publik maupun pemimpin daerah dilakukan dengan pemberlakuan sanksi-sanksi berat untuk tiap pelanggarannya.

Menciptakan sistem sosial yang baik untuk mengurangi tingkat korupsi.

Memberikan penyuluhan dim pada pegawai-pegawai bare untuk mematuhi hak dan kewajibannya sebagai pegawai sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku.

Peningkatan gaji pegawai berdasarkan produktivitas kerja merupakan salah satu jalan untuk mengurangi tingkat korupsi.

Menciptakan hubungan yang baik antara atasan dan bawahan dapat membantu terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, efisien, dan efektif sehingga tidak ada ketidaksempurnaan informasi yang mengakibatkan penyalahgunaan wewenang.

Meningkatkan akuntabilitas di instansi kerja untuk mengurangi pemanfaatan dari pihak-pihak yang tidak berwenang untuk kepentingan pribadi mereka.

Meningkatkan sistem pengawasan kontrol kerja untuk semua pegawai sehingga dapat mengurangi keleluasaan pegawai yang diharapkan mampu mengurangi pemanfaatan keleluasaan untuk kepentingan pribadi.

Mencegah korupsi dapat dilakukan dengan pendekatan peningkatan pengawasan dan menyempurnakan sistem manajemen publik, penegakan hukum dan pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada para koruptor, dan memperhatikan faktor moral manusia.

Daftar Pustaka

Acemoglu, Daron dan Thierry Verdier. Maret 2000. *The Choice between Market Failures and Corruption*. The American Economic Review, Vol. 90, No. 1 pp. 194-211. Download web: <http://www.jstor.org/stable/117287> Diakses tanggal 31 Maret 2009.

Amemiya, T. 1981. *Qualitative Response Models: A Survey*. Journal Economic Literature 19(4).

Atmasasmita, Romli. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Mandar Maju.

- Bardhan, Pranab dan Dilip Mookherjee. Juni 2005. *Decentralization, Corruption And Government Accountability: An Overview*. Handbook of Economic Corruption.
- Basweda, Abdillah Rasyid. 2003. *Agency Theory*. Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Chang, Jen Chai dan Ching Chong Lai. Maret 2002. Is the Efficiency Wage Efficient? The Social Norm and Organizational Corruption The Scandinavian Journal of Economics Vol. 104 No. 1 pp. 27-47. Download web: <http://www.jstor.org/stable/3441140> Diakses tanggal 31 Maret 2009.
- Fatah, Eep Saefulloh. 1998. *Bangsa Saya yang Menyebalkan, Catatan tentang Kekuasaan yang Pongah*. Jakarta: Rosda.
- Gujarati, Damodar N. 2000. *Basic Econometrics*, 4th edition. Singapore. Mc Graw Hill.
- Ham, Ong Hok. 1983. *Rakyat dan Negara*. Jakarta: Sinar Harapan & LP3ES.
- Henderson, J. Vernon dan Ari Kuncoro. 2006. Corruption in Indonesia.
- Helge Fjeldstad, Odd dan Bertil Tungodden. 2001. *Fiscal Corruption*. CMI Working Paper.
- Klitgaard, Robert, 2002. *International Cooperation Against Corruption*.
- Liao, Tim Futing. 1994. *Interpreting Probability Models Logit, Probit, and Other Generalized Linear Models*. Sage Publications.
- Lind, Douglas A. 2008. *Statistical Techniques in Business and Economics with Global Data Sets*, Thirteen Edition. New York: McGraw Hill.
- Maddala, G.S. 2001. *Introduction to Econometrics*. Third Edition. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
- Mocan, Naci. Oktober 2008. *What Determines Corruption? International Evidence From Microdata*. Economic Enquiry A13UINFORM Global pg. 495.
- North, D.C. 1990. *Institutions, Institutional Change, and Economy Performance*. Cambridge University Press.

Richardson, Grant. 2006. *The Impact of Economic, Legal and Political Factors on Fiscal Corruption: A Cross-Country Investigation*. Department of Accountancy, Faculty of Business, City University of Hong Kong, 83 Tat Chee Avenue, Kowloon Tong, Hong Kong.

Rinaldi, Taufik dkk- 2007. *Fighting Corruption in Decentralized Indonesia*.

Rose, Susan dan Ackerman. 2006. *International Handbook on the Economics of Corruption*. Edward Elgar Publishing Limited.

Shleifer, Andrei dan Robert W. Vishny. Agustus 1993. *Comiption. The Quarterly Journal of Economics* Vol. 108 No. 3 pp. 599-617. Download Web <http://www.jstore.org/stable/2118402> Diakses tanggal 29 Maret 2009.

Shordt, Kathleen. 2008. *Corruption and decentralization: Strengthening Capacity for Local Governance*. Symposium on Sustainable Water Supply and Sanitation.

Stavin, R.E. 1995. *Cooperative Learning; Theory Research and Practice*. Allyn Bacon. Boston.

Vazquez, Jorge Martinez, F. Javier Arze, dan Jameson Boex. 2004. *Corruption, Fiscal Policy, And Fiscal Management*. Laporan USAID.

Wayan Sukadana, I. 2007, *Desentralisasi dan Eksistensi Korupsi di Indonesia*.

Winarno, Wing Wahyu. 2007. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. UPP STIM YKPN.

Artikel :

Transparency International Global Corruption Barometer, 2005

Transparency International Global Corruption Barometer, 2006

Transparency International Global Corruption Barometer, 2007

Transparency International Indonesia, 2008

Situs :

Web site media massa kabar NTT : <http://www.kabarntt.com>

Web site media massa Republika: <http://www.republika.com>

Web site Mendagri: <http://www.mendagri.go.id>

Web site KPK : <http://www.kpk-go.id>